

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanburry, 2013). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. (Soimah, 2014)

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. (Adhi dan Suhardjo, 2013)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015). Karena laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan secara efektif.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami.

Demi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Warsito:2010).

Informasi yang terdapat dalam laporan keuang bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan yang menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus di audit dan dalam hal ini di audit oleh BPK. Laporan keuangan di audit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah memiliki kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan. (Dezan Firman Gunawan, 2017)

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini, 2012:4)

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016 Tingkat Pemerintahan**

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW
2012	52%	33%	15%	0%	100%	18%	64%	17%	1%	100%	34%	58%	8%	0%	100%
2013	48%	45%	6%	0%	100%	26%	61%	10%	3%	100%	62%	38%	3%	0%	100%
2014	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2015	85%	15%	0%	0%	100%	55%	37%	7%	1%	100%	66%	33%	1%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	78%	21%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 2016 dan IHPS 1 2017 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada Pemerintah Provinsi, opini WTP bertambah dari

29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD ditahun 2016 (91%). Begitupula untuk Pemerintah Kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) Menjadi 272 LKPD (66%), dan pada Pemerintah Kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%).

Fenomena yang terjadi tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (2015) memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, terdiri dari atas 117 objek pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan Badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, terdiri atas 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan temuan yang memuat 15.434 permasalahan, temuan itu meliputi 51,12% permasalahan, masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 48,88% masalah soal kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari masalah ketidakpatuhan tersebut berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak) finansial senilai Rp 21,62 triliun.

(Arliando Habib Pratama-detikfinance, 2015)

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Jabar, Selasa (7/6/2016). Penyerahan LHP gelombang II itu

diberikan kepada 12 Kabupaten/Kota. Dari 12 daerah, 8 pemda di Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5 Pemda lainnya belum WTP “Masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).” Ujar kepala perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar Arman Syifa dikantor BPK Perwakilan Jabar, Selasa (7/6/2016). “Tahun ini BPK masih menemukan adanya beberapa hal signifikan. Aset tanah masih banyak yang menjadi catatan, masih banyak yang belum bersertifikat, “terangnya. Arman menambahkan, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar disejumlah pemda. Untuk tahun 2015, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai Rp 58,98 miliar.

(Avitia Nurmatari-detik news, 2016)

3. Fenomena yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. “kami sangat berterimakasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa,” ungkap Ridwan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, (Senin 12 Juni 2017). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 Triliun yang harus ditata ulang. Dalam

kurun waktu yang hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 Triliun. “Tinggal sedikit lagi, Rp 2,5 Triliunnya memang tidak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset, “Tuturnya. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. “Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final insya Allah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap. “ujarnya.

Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. “Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikan hutangnya, “ucap Ridwan Kamil. Kepala kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Memang catatan kami bahwa apa yang sudah dilakukan Pemda itu jauh lebih baik daripada tahun lalu. Artinya sudah ada perkembangan dari apa yang kami rekomendasikan tahun lalu dengan yang kami temukan tahun ini, “ucap

Arman. Pada pemeriksaan kali ini, Pemerintah Kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek (Arief Gunawan-pikiran rakyat, 2017)

4. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan pemerintah daerah di Indonesia adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menjurus ke tindak pidana korupsi (Asmara, 2017).

Salah satu indikator atas Laporan Keuangan yang baik adalah keterandalan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: keterandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan pencapaian organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Erly, 2010:312). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengendalian Internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas. (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014)

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sebuah sistem akuntansi. Sistem akuntansi



didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki perusahaan. (Mahmudi, 2007). Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian intern adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan yang berlaku dan peningkatan kegiatan operasi secara efektif dan efisien.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang diketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kriteria atau existensi suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. (Ni Luh Nyoman, dkk, 2014)

Meskipun perangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut masih

rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan. Hal ini disebabkan kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya bidang akuntansi. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan khususnya dibagian keuangan belum memadai. Meskipun secara periodik telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap petugas mengenai standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi instansi namun masih ditemui beberapa petugas yang belum memahaminya. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan terutama oleh petugas yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut agar pengelolaan keuangan di instansi pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. (Dian, 2010)

Peran penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting untuk menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Selain pengendalian internal yang baik didalam sebuah perusahaan, penyusunan laporan keuangan hendaknya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenaga kerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu asset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. (Abel Putra Setyawan, 2015)

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari sebelumnya yang pernah diangkat oleh T. Asri Yulia, Ni Luh Nyoman Ari Udayanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintahan, maka dituntut untuk menerapkan akuntansi

pemerintahan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ditunjang dengan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi.

Permasalahan yang terumuskan antara lain :

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Bagaimana Kompetensi Staf Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
5. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
6. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
7. Seberapa Besar Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
8. Seberapa Besar Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kompetensi Staf Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan

Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah  
Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

###### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman terutama terkait dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung

###### 2. Bagi Instansi

a. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.

b. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

###### 3. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian di bidang sistem informasi akuntansi yang ada di pemerintahan.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

##### **2. Bagi Penulis**

Menambahn ilmu dan wawasan tetntang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

##### **3. Bagi Instansi**

Pendidikan mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kualitas laporan keuangan.

##### **4. Bagi Masyarakat**

a. Memeberikan kontribusi terutama pada literatur-literatur standar akuntansi pemerintahan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berfikir dans ebagai pengetahuan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tetntang standar akuntansi pemerintahan.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.